

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ambon, 11 Januari 2023  
Kepala Subbag Pengelola Keuangan dan  
BMN



M.IKBAL TAHALUA., SH., M.Si  
NIP.197708102003121001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Pernyataan Tanggung Jawab	III
Ringkasan	x
I. Laporan Realisasi Anggaran	x
II. Neraca	x
III. Laporan Operasional	x
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	x
V. Catatan atas Laporan Keuangan	x
A. Penjelasan Umum	x
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	x
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	x
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
F. Pengungkapan Penting Lainnya	x
VI. Lampiran dan Daftar	x



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH MALUKU  
Jalan Sultan Babullah Nomor 17-18 Ambon 97115  
Telepon.(0911) 352803 Faximile 352807

---

### **PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB**

Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku 408893 yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ambon, 11 Januari 2023

Kepala Subbag Pengelola  
Keuangan dan BMN



M.IKBAL TAHALUA, SH., M.Si  
NIP.197708102003121001

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku 408893 Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.0 atau mencapai 0.00 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp.1.638.187.361 atau mencapai 98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.672.000.000

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp.0., yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.0.; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.0., dan Rp.0

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.0 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.1.638.187.361 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.(1.638.187.361) Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.(0) dan sebesar Rp.(0) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.(1.638.187.361)

### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp.0

dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.(1.638.187.361) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.1.638.187.361 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp.0

## **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### KANTOR WILAYAH MALUKU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Cat.	TA 2022		Realisasi di Atas (Di Bawah)	%
		ANGGARAN	REALISASI		
Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
Pendapatan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-		0
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>0,00</b>
<b>BELANJA</b>	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-		0,00
Belanja Barang	B.4	1.672.000.000	1.638.187.361	(33.812.639)	97,98
Belanja Modal	B.5	-	-		0,00
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-		0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.672.000.000</b>	<b>1.638.187.361</b>	<b>(33.812.639)</b>	<b>97,98</b>

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

## II. NERACA

### KANTOR WILAYAH MALUKU NERACA PER 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2022	2021
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	-
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.11		
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13		
Jumlah Piutang Jangka Panjang			
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti	C.21	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.22	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.23	-	-
Aset Lain-Lain	C.24	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.25	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
<b>JUMLAH ASET</b>			
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.26	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.27	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.28	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.29	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>			
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.29	-	-
<b>JUMLAH EKUITAS</b>			
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### KANTOR WILAYAH MALUKU LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	-
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	43.196.771	33.533.000
Beban Barang dan Jasa	D.4	476.978.000	466.459.500
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.118.012.590	946.620.918
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>1.638.187.361</b>	<b>1.446.613.418</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(1.638.187.361)</b>	<b>(1.446.613.418)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar	D.11		-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya		-	765.000
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya		159.000	765.000
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		159.000	-
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		-	765.000
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(1.638.187.361)</b>	<b>(1.445.848.418)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Pendapatan PNBPNP	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(1.638.187.361)</b>	<b>(1.445.848.418)</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.**

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****KANTOR WILAYAH MALUKU  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2022	2021
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(1.638.187.361)	(1.445.848.418)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		1.638.187.361	1.445.848.418
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>	<b>E.4</b>	-	-
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.5</b>	-	-

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Maluku

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Mempunyai Tugas dan Fungsi dalam Melakukan Koordinasi Dibidang Bimbingan dan Dukungan Implementasi Akuntansi Pemerintah dengan cakupan wilayah Provinsi Maluku. Melalui peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku diharapkan kualitas laporan keuangan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan atas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku berkomitmen dengan visi dan misi:

“Masyarakat memperoleh kepastian hokum, melindungi hak asasi manusia”

Untuk mewujudkan visi misi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan usaha-usaha yang berkelanjutan berkaitan dengan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual
2. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi Keuangan yang dihasilkan oleh system akuntansi berbasis akrual yang diimplemetasikan.

3. Mengembangkan system informasi yang andal dan terpercaya.

Menyelenggarakan system dukungan pengambilan keputusan kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku 408993. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis  
Akuntansi*

## **A.3. Basis Akuntansi**

Kantor Wilayah Kemeterian Hukum dan HAM Maluku menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas

atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan

entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku 408893. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-LRA*

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat

dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### *Belanja*

#### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### *Beban*

#### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan

organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya

sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah Melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan Terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilain dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei

lapangan untuk objek penilaian selaian Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan Organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa penggunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang pengelolaan BMN.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan

penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset

lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

### *Kewajiban*

#### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

##### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

##### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

### *Ekuitas*

#### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Realisasi  
Pendapatan Rp.0.,*

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0. atau mencapai 0.00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0. Pendapatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

#### *Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan	-	-	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>#REF!</b>	<b>-</b>	<b>#REF!</b>

Realisasi Pendapatan Jasa TA 2022 mengalami kenaikan 0.00 persen dibandingkan TA 2021. Selain itu, Pendapatan Lain-lain Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. mengalami kenaikan sebesar 0.00 persen

*Realisasi Belanja  
Negara  
Rp.1.638.187.361*

### B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.1.638.187.361 atau 98% dari anggaran belanja sebesar Rp.1.672.000.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022*

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	#DIV/0!
Belanja Barang	1.672.000.000	1.638.187.361	97,98
Belanja Modal	-	-	#DIV/0!
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>1.672.000.000</b>	<b>1.638.187.361</b>	<b>97,98</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.672.000.000</b>	<b>1.638.187.361</b>	<b>97,98</b>

**Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2022 adalah Rp.1.638.187.361 atau 98% adalah ;**

1. Belanja Barang Berupa Belanja Bahan Rp.133.344.000
2. Belanja Barang Berupa Honor Kegiatan Rp.265.100.000
3. Belanja Barang Berupa Sewa untuk Kegiatan Rp.34.240.000
4. Belanja Barang Berupa Belanja Jasa Profesi Rp.41.600.000
5. Belanja Barang Berupa Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp.995.392.590, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp.29.550.000 dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota Rp.93.070.000
6. Belanja Barang Persediaan konsumsi Rp.22.787.076 dan Penanganan Pandemi Covid-19 Rp.20.409.695

Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami Penurunan 13,24% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain :

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	#DIV/0!
Belanja Barang	1.638.187.361	1.446.613.418	13,24
Belanja Modal	-	-	#DIV/0!
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>1.638.187.361</b>	<b>1.446.613.418</b>	<b>13,24</b>

*Belanja Pegawai  
Rp.0.,*

### **B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS Realisasi belanja TA 2022 mengalami Kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan dari TA 2021.

*Belanja Barang  
Rp.1.638.187.361*

### **B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.1.638.187.361 dan Rp.1.446.613.418 Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami kenaikan 13.24% dari Realisasi Belanja Barang TA 2021.

*Perbandingan Belanja Barang TA 2022 dan 2021*

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional		0	#DIV/0!
Belanja Barang Non Operasional	401.844.000	364.991.500	10,10
Belanja Jasa	78.534.000	108.878.000	(27,87)
Belanja Pemeliharaan	0	0	#DIV/0!
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.118.012.590	964.138.318	15,96
Belanja Persediaan	43.196.771	33.533.000	28,82
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.641.587.361</b>	<b>1.471.540.818</b>	<b>11,56</b>
Pengembalian Belanja	(3.400.000)	24.927.400	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.638.187.361</b>	<b>1.446.613.418</b>	<b>13,24</b>

*Belanja Modal  
Rp.0.,*

### **B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

#### **B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0..

*Belanja Modal  
Peralatan dan  
Mesin Rp.0.*

#### **B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 adalah sebesar Rp.0, mengalami kenaikan sebesar 0.00 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp.0.,

#### **B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal TA 2022 Rp.0. dan TA 2021 Rp.0. Realisasi Belanja Modal TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 0.00 persen dibandingkan Realisasi TA 2021.

#### **B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0

### **B.5.5 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 0.00 persen dibandingkan Realisasi TA 2021.

*Belanja Bantuan Sosial Rp.0.*

### **B.6 Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

## **• PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

*Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.0*

### **C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2022 dan 2021*

Keterangan	TH 2022	TH 2021
Uang Tunai	-	-
Bank Mandiri KC Ambon Pattimura	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Kas di Bendahara Penerimaan Rp.0*

### **C.2 Kas di Bendahara Penerimaan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar masing-masing Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang

tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya  
dan Setara Kas  
Rp.0.*

### **C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Piutang PNB  
Rp.0.*

### **C.4 Piutang PNB**

Saldo Piutang PNB per tanggal per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

*Bagian Lancar  
Tagihan  
TP/TGR  
Rp.0*

### **C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal Per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar  
TPA  
Rp.0.*

### **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih –  
Piutang Lancar  
Rp.0*

### **C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

*Belanja Dibayar  
di Muka Rp.0.*

### **C.8 Belanja Dibayar di Muka**

Saldo Belanja Dibayar di Muka Tahun Per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0.,

*Pendapatan  
yang Masih  
Harus Diterima  
Rp.*

### **C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0. merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

*Persediaan  
Rp.0*

### **C.10 Persediaan**

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp.0 dan Rp.5.623.500 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2022 dan 2021

Jenis	TH 2022	TH 2021
Barang Konsumsi	-	5.623.500
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>5.623.500</b>

Tagihan  
TP/TGR  
Rp.0

### C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan  
Penjualan  
Angsuran  
Rp.0.

### C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih –  
Piutang Jangka  
Panjang  
Rp.(0)

### C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Tanah Rp.0*

#### **C.14 Tanah**

Tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Satker 408893 per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0.

*Peralatan dan Mesin Rp.,0.*

#### **C.15 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.0. dan Rp.0.

*Gedung dan Bangunan Rp.0.*

#### **C.16 Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.0. dan Rp.0.

*Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp.0.*

#### **C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp.0.

*Aset Tetap Lainnya Rp.0*

#### **C.18 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.0. dan Rp.0.

*Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp.0*

#### **C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp0.

*Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp.(0)*

#### **C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp.(0) dan Rp.(0).

*Aset Tak Berwujud Rp.0.*

### **C.21 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 2021 Rp.0. dan Rp.0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

*Aset Lain-Lain Rp.0.*

### **C.22 Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.0. dan Rp.0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

*Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp.(0)*

### **C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp.(0) dan Rp.(0). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Uang Muka dari KPPN Rp.0*

### **C.24 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada Pihak Ketiga Rp.0*

### **C.25 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0.

*Pendapatan  
Diterima di  
Muka  
Rp.0.*

### **C.26 Pendapatan Diterima di Muka**

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

*Beban yang  
Masih Harus  
Dibayar Rp.0.*

### **C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2022 dan 2021 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

*Ekuitas  
Rp.0.*

### **C.28 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.5.623.500 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Pendapatan  
PNBP Rp.0*

## **D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

### **D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.0. dan Rp.0.

*Beban Pegawai  
Rp.0.*

### **D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0.

*Beban  
Persediaan  
Rp.43.196.771*

### **D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.43.196.771 dan Rp.33.533.000 Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-

barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan TA 2022 dan 2021*

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	22.787.076	0	#DIV/0!
Beban Persediaan pita cukai, materai dan legas	-	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Lainnya	-		#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>22.787.076</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

*Beban Barang dan Jasa  
Rp.476.978.000*

**D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.476.978.000 dan Rp.466.459.500. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Bahan	133.344.000	28.090.000	374,70
Beban Honor Output Kegiatan	265.100.000	49.050.000	440,47
Beban Sewa	34.240.000	8.560.000	
Beban Jasa Profesi	41.600.000	14.000.000	197,14
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2.694.000	8.174.000	
<b>Jumlah</b>	<b>476.978.000</b>	<b>107.874.000</b>	<b>342,16</b>

Beban  
Pemeliharaan  
Rp.0.,

#### **D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Tahun 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0. dan Rp.0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban  
Perjalanan  
Dinas  
Rp.1.118.012.5  
90

#### **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.1.118.012.590 dan Rp.415.283.000 Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

##### *Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	995.392.590	373.883.000	166,23
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	29.550.000	18.300.000	61,48
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	93.070.000	23.100.000	302,90
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>1.118.012.590</b>	<b>415.283.000</b>	<b>169,22</b>

Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat  
Rp.0

#### **D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Beban Bantuan  
Sosial Rp.0

#### **D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial Tahun 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi Rp.0

#### **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing

sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

*Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp.0*

#### **D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

*Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp.0*

#### **D.12 Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.0. dan Rp.0 terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

*Pos Luar Biasa Rp.0*

#### **D.13 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Pos Luar Biasa TA 2022 dan 2021*

URAIAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNPB	0	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan	0	0	#DIV/0!
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

### **PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal Rp.0.*

#### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

*Defisit LO Rp.(1.638.187.361)*

#### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar

Rp.(1.638.187.361) dan Rp.(1.445.848.418) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian  
Nilai Aset  
Rp0*

### **E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai  
Persediaan Rp.0*

### **E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

*Selisih  
Revaluasi Aset  
Tetap Rp.(0)*

### **E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.(0) dan Rp.(0) Selisih Revaluasi Aset Tetap tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan berupa jalan jembatan dan bangunan air.

*Koreksi Aset  
Tetap Non  
Revaluasi Rp.0*

### **E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain-Lain  
Lain Rp.0*

### **E.3.6 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

*Transaksi Antar  
Entitas  
Rp.1.638.187.3  
61*

### **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.1.638.187.361 dan Rp.1.445.848.418. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

#### **E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp.0 sedangkan DKEL sebesar Rp.0.

#### **E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

#### **E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

dan 2021 sebesar Rp.0-. dari total Rp.0,

*Ekuitas Akhir  
Rp.0*

## **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 2021 adalah Rp.0 dan Rp.0

## **F. PENGUNGKAPAN - PENGUNGKAPAN LAINNYA**

### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

#### **• Laporan Rekening Satker Kantor Wilayah Maluku**

1. Per 30 Juni 2022 Saldo Pada Rekening Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.0.,
2. Per 30 Juni 2022 Saldo Pada Kas Tunai Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.0.,

### **F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN.**

#### **• Laporan Kinerja Pada Program Dipa AHU adalah sebagai berikut :**

1. Layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Maluku Target Kinerja dengan Anggaran Belanja sebesar Rp.1.672.000.000 dengan Realisasi sebesar Rp.1.638.187.361 mencapai 97.98 Persen
2. Layanan MPW, MPD dan MKN Notaris pada Kantor Wilayah Maluku Target Kinerja dengan Anggaran sebesar Rp.591.992.000 dengan Realisasi Rp.583.067.840 mencapai 99.067 Persen

#### **• Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2022**

Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2022 pada Kantor Wilayah Maluku sebagai berikut :

1. Kuasa Pengguna Anggaran (**H. M ANWAR N, S.Sos., M.H**)
2. Pejabat Pembuat Komitmen (**MOKSEN HASAN, S.H., M.H**)
3. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (**Dr. M. IKMAL IDRUS, S.H., M.H**)
4. Bendahara Pengeluaran (**MAICHEL WILLIAM HUWAE, S.H.**)
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu (**SARTIKA CHANDRA DEVI**)

Pada Tahun Anggaran 2022 ada Pergantian Pejabat di Kantor Wilayah Maluku di bulan Februari 2022 yaitu :

1. Kepala Kantor Wilayah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yaitu dari **Drs. ANDI NURKA, S.H., M.H** ke **H. M ANWAR N, S.Sos.,M.H**
2. Kepala Divisi Administrasi sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yaitu dari **Agung Rektono Seto, S.H., M.H ke La Margono, S.H., M.H** (Penunjukan PPSPM sementara) dikarenakan Permintaan Anggaran untuk Kegiatan di Kantor Wilayah Maluku. 01 April 2022 telah digantikan menjadi **Dr. M. IKMAL IDRUS, S.H., M.H.**

• **Konsep Temuan BPK 2018.**

Pada tahun 2018 Kanwil Maluku Khususnya DIPA Program AHU di Perikas oleh BPK dan terdapat Konsep Temuan BPK dengan surat Nomor : 10/PDPT-AHU/08/2018 perihal Penyampaian Konsep TP dengan penjasasn sebagai berikut :

1. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Khususnya DIPA Program AHU belum mengenakan denda atas keterlambatan pelaksanaan pengadaan sewa kendaraan operasional kepada CV. Menara Abadi sebesar Rp.12.745.317. **Tindaklanjut Konsep Temuan BPK** atas Keterlamabatan Pelakasana Pengadaan sewa kendaraan operasional CV. Menara Abadi telah dilakukan penyetoran melalui pemotongan pেমabayaran termin II tahun 2018 dengan nomor SPM.00084 tanggal 08 Oktober 2018 dan Nomor SP2D.180611302009822 tanggal 10 Oktober 2018 senilai Rp.12.745.317.
2. Pembayaran Honorarium belum diberikan kepada 9 orang penerima sebesar Rp.27.805.000 dan kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp.560.000 serta belum didukung dokumen pertanggungjawaban yang lengkap. **Tindaklanjut Konsep Temuan BPK** atas Pembayaran Honorarium

sebesar Rp.27.805.000 telah diberikan kepada 9 orang dan di Kembalikan ke kas Negara sebesar Rp.17.490.00 dan Kelebihan Honor Kegiatan sebesar Rp.560.000 telah disetorkan ke Kas Negara.

- **Penggunaan Rekening Satker**

Pada tahun 2020 Kementerian Keuangan telah Mengeluarkan Peraturan tentang pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian/Lembaga. Atas hal tersebut Direktorat Jenderal AHU selaku Wilayah dari Kantor Wilayah Maluku telah melakukan Surat Permohonan Persetujuan Perubahan Rekening Satker kepada Kementerian Keuangan dan mendapat Surat Persetujuan Perubahan Rekening Satker **Nomor.S-1065/WPB.12/KP.05/2020 Tanggal 08 Juni 2020**. Dan Penggunaan Rekening Pengeluaran pada satuan kerja Kantor Wilayah Maluku Program DIPA AHU telah melakukan Pemindahbukuan dan penutupan Rekening Giro ke Rekening Virtual dengan **Nomor.S-616/PB.3/2021 Tanggal 30 Maret 2021** untuk perpindahan saldo dari Rekening Giro ke Rekening Virtual telah dilakukan.